



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

RENCANA KERJA TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim

Assalammu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan nikmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Dokumen Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang mana berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

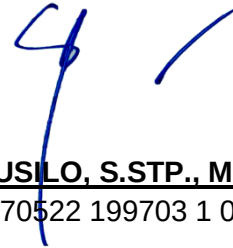
Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Dokumen ini.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Painan, Agustus 2025

Kepala Bapperida
Kabupaten Pesisir Selatan



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
NIP. 19770522 199703 1 0001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPEDALITBANG TAHUN LALU	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 8
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II -11
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	II -13
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II -18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bapedalitbang.....	III - 1
3.3. Program Dan Kegiatan.....	III – 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
.....	
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	II – 3
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	II - 10
Tabel	2.3.	Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	II -12
Tabel	2.4.	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II -18
Tabel	3.1	Rencana Program dan Kegiatan Bapedalitbang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	III -4
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	IV-3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Reanja Perangkat Daerah Tahun Lalu.... dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... Perangkat Daerah	II-14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program Kegiatan.....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat..... Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset dan Inovasi Kab. Pesisir Selatan	II-12
Tabel 2.3	Review RKPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2026.....	II-16
Tabel 3.1	Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset..... dan Inovasi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2026	III-3
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2026..... Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah daerah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam sebuah Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (Bapperida) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain dari aturan yang mengikat tersebut, maka dalam penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan juga memperhatikan hal-hal berikut yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
2. Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventerisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2040;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Bapperida dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

- a Pedoman penyusunan RKA Bapperida Tahun 2026
- b Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapperida Tahun 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2026, meliputi :

- Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan rumusan dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027.
- Bab V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp. 7.180.816.750,- (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.220.136.572,- (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 86,62 % atau bisa dikatakan tinggi.

Penyusunan Renja Bapperida sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam Penyusunan Renja Bapperida Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi saat ini
- b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- c. Tujuan yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahan;
- d. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- e. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana

Penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 juga memperhatikan hal– hal sebagai berikut :

- a Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan kerja tahun anggaran 2026;
- b Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Bapperida, Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 (T.C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Riset Daerah											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (=8/7)	10	11 (=6+8+10)	12 (=11/5)
	URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB										
	URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
5. 01.	URUSAN PERENCANAAN										
5. 01. 01.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	AA (90,47)	A	AA (90,1)	A (89,96)	99,95	AA (90,1)	AA (90,1)	100
5. 01. 01. 2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase								
5. 01. 01. 2.01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	8	10	125	10	10	143
5. 01. 01. 2.01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	laporan	22	23	25	25	100	25	25	114
5. 01. 01. 2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase								
5. 01. 01. 2.02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	(bulan) orang	504	476	504	504	100,00	504	504	100
5. 01. 01. 2.02. 02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	(bulan) dokumen	12	12	24	24	100	12	12	100

5. 01. 01. 2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase								
5. 01. 01. 2.06. 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	2	1	1	100	1	1	100
5. 01. 01. 2.06. 04.	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	2	1	1	100	1	1	100
5. 01. 01. 2.06. 05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	2	1	1	100	1	1	100
5. 01. 01. 2.06. 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	28	24	36	36	100	36	36	100
5. 01. 01. 2.06. 08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	12	100
5. 01. 01. 2.06. 09.	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	12	100
5. 01. 01. 2.06. 10.	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	12	100
5. 01. 01. 2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase								
5. 01. 01. 2.07. 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	2	0	0	0	#DIV/0!	10	10	100
5. 01. 01. 2.07. 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	2	12	2	0	0	12	12	100

5. 01. 01. 2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase								
5. 01. 01. 2.08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	12	100
5. 01. 01. 2.08. 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	(bulan) laporan	12	36	12	12	100	12	12	100
5. 01. 01. 2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase								
5. 01. 01. 2.09. 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	(bulan) unit	1	1	1	1	100	1	1	100
5. 01. 01. 2.09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	(bulan) unit	8	8	8	8	100	8	8	100
5. 01. 01. 2.09. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	(bulan) unit	24	34	34	34	100,00	34	34	100
5. 01. 01. 2.09. 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(bulan) unit	3	2	2	2	100	2	2	100
5. 01. 02.	Program : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	24,6	24,15	24,9	24,25	97,39	24,50	72,90	298
		Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	18,00	-	18,3	17,98	98,25	20,00	37,98	190
5. 01. 02. 2.01.	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memenuhi standar baik	Persentase								

5. 01. 02. 2.01. 07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	2	3	11	11	100	2	2	100
5. 01. 02. 2.02.	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	Persentase								
5. 01. 02. 2.02. 01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen	2	40	40	55	137,5	40	40	100
5. 01. 02. 2.02. 02.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	orang	40	26	26	52	200	40	40	100
5. 01. 02. 2.03.	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase PD yang menyampaikan laporan tepat waktu 2. persentase rekomendasi evaluasi yang ditindak lanjuti PD	1. Persentase 2. Persentase								
5. 01. 02. 2.03. 01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	laporan	2	0	10	24	240	10	10	100
5. 01. 02. 2.03. 03.	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	laporan	4	0	4	12	300	5	5	100
5. 01. 03.	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai								
5. 01. 03. 2.01.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah OPD yang berkoordinasi di bawah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah								
5. 01. 03. 2.01. 01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	18	0	42	84	200	2	2	100
5. 01. 03. 2.01. 02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	2	0	5	10	200	2	2	100

5. 01. 03. 2.01. 03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	2	0	4	8	200	2	2	100
5. 01. 03. 2.01. 04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	laporan	2	0	2	4	200	2	2	100
5. 01. 03. 2.01. 05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	0	14	28	200	14	14	100
5. 01. 03. 2.01. 06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	0	1	2	200	14	14	100
5. 01. 03. 2.01. 07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	2	0	8	16	200	14	14	100
5. 01. 03. 2.01. 08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	laporan	2	3	3	6	200	3	3	100
5. 01. 03. 2.02.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah OPD yang berkoordinasi dibawah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah								
5. 01. 03. 2.02. 01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	4	8	16	200	8	8	100
5. 01. 03. 2.02. 02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	2	0	1	2	200	4	4	100

5. 01. 03. 2.02. 03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	2	0	8	16	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.02. 04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	2	1	1	2	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.02. 05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	8	16	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.02. 06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2	0	1	2	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.02. 07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	dokumen	2	0	8	16	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.02. 08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	2	1	1	2	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.03.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase program prioritas Renja PD terhadap prioritas RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase								
5. 01. 03. 2.03. 01.	Koodinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	3	8	16	200	8	8	100

5. 01. 03. 2.03. 02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	2	0	1	2	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.03. 03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	2	0	8	16	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.03. 04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	laporan	2	1	1	2	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.03. 05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	0	8	16	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.03. 06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2	0	1	2	200	2	2	100
5. 01. 03. 2.03. 07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	2	0	8	16	200	4	4	100
5. 01. 03. 2.03. 08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	laporan	2	1	1	2	200	4	4	100
5. 05.	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5. 05. 02.	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam dokumen perencanaan	%	90,00	-	90,00	90,00	100	90,00	180	200
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	62,80	51,25	62,52	62,52	100,00	62,72	176,49	281
		Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Nilai	100	-	100	97	97	100	197	197
5. 05. 02. 2.01.	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kajian kelitbangan yang dihasilkan terhadap kebutuhan	Persentase								
5. 05. 02. 2.01. 12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	laporan	2	0	2	4	200	4	4	100

5. 05. 02. 2.04.	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam pelaksanaan inovasi daerah	Jumlah								
5. 05. 02. 2.04. 01.	Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekrayaan di bidang teknologi dan inovasi	dokumen	1	0	1	2	200	3	3	100
5. 05. 02. 2.04. 04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	laporan	1	0	1	2	200	2	2	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan, maka Bapperida menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas yang Berbasis Riset dan Inovasi”.

Dari tujuan tersebut ada empat sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja.

Dari evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi terhadap 4 komponen SAKIP yaitu :

- a. Perencanaan kinerja
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaporan kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil penilaian Menpan RB tentang nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja memperoleh bobot 24,19 dari total bobot yang ditetapkan sebesar 30. Dengan bobot pada komponen ini mendorong SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan mendapat skor BB. Dengan demikian berarti sebagian besar OPD di Pesisir Selatan perencanaannya sudah selaras dengan RPJMD. Akan tetapi masih ada beberapa OPD yang terus memaksakan perencanaan yang disusun dalam rangka memenuhi struktur yang ada. Hal ini adalah faktor yang harus dicermati untuk dirubah pada tahun berikutnya. Pada tahun 2024 komponen pengukuran kinerja mendapat capaian 18,05 dengan Bobot 30%.

2. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan target kinerja nilai Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan nilai A (89,96) pada tahun 2024.
3. Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam dokumen perencanaan dengan capaian 100% di tahun 2024.
4. Meningkatnya inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi daerah dengan nilai 59,29 di tahun 2024 dan nilai kematangan inovasi Bapperida dengan nilai 97.

Kinerja badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C 30) sesuai dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan

Inovasi Tahun 2021-2026. Untuk target Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi yang telah disesuaikan dengan Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2 (T.C-30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja			24,15	24,9	24,42	24,50	24,15	24,25	24,42	24,5	
1	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja			-	18,3	18,33	20,00	-	17,98	18,33	20,00	Perubahan tahun 2023
2	Nilai AKIP Bapedalitbang			A	A (90,00)	AA (90,1)	AA (90,2)	A (89,96)	A (89,93)	AA (90,1)	AA (90,2)	
3	Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Dokumen Perencanaan			-	90%	90,0%	90,0%	-	90%	90%	90%	Perubahan tahun 2023
4	Nilai Kematangan Inovasi Bapedaltbang			-	100	100	100	-	97	100	100	Perubahan tahun 2023
5	Indeks Inovasi Daerah			60,02	62,32	62,52	62,72	51,62	58,34	62,52	62,72	

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025-2029 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH											
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas yang Berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	-	-	75	80	85	90	95	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja (Angka)	24,19	24,42	24,6	24,8	25	25,2	25,4	
			Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja (Angka)	18,05	18,33	18,53	18,73	18,93	19,13	20	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah (%)	0	0	100	100	100	100	100	
			Jumlah karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi (Angka)	0	0	1	1	1	1	1	
			Jumlah karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Angka)	0	0	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	90,43	90,45	90,47	90,5	90,52	90,55	90,57	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu-isu penting di Bapperida dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang koordinasi antar OPD secara horizontal maupun koordinasi Vertikal, dimana setiap tahun Bapedalitbang melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat Kerja dengan pesertanya Dinas / Instansi Terkait di Kabupaten / Kota dan Provinsi .
- b. Pengelolaan Data yang belum maksimal
- c. Capaian program dan kegiatan yang tercantum dalam perencanaan belum maksimal
- d. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bapperida, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan.
Sebagai Perangkat Daerah yang diberi tugas sebagai perencanaan baik anggaran dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, Dengan jumlah tenaga teknis sangat terbatas dikaitkan dengan rentang tugas-tugas yang sangat banyak dan padat serta mendesak, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai perencana kurang maksimal.
 - 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
Sebagian tugas yang diberikan tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada, oleh sebab itu tugas yang diterima terkadang tidak cepat selesai dengan waktu perencanaan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan jumlah personil maka para personil di tuntut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas agar tercapai perencanaan yang maksimal
 - 3) Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Peningkatan sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar aparatur dapat meningkatkan kapasitas kerja dan sumber daya para aparatur demi pencapaian suatu perencanaan yang telah ditentukan.
 - 4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk perencanaan.
Kualitas data yang dibutuhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari data yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan
 - 5) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait.
Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan instansi-instansi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait maka pelaksanaan perencanaan tersebut tidak berjalan memadai.
- e. Dampak
Keterbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.
 - f. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan tupoksi, kekuatan dan kewenangan yang ada pada Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan.

- g. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Bapperida yaitu:
1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
 2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data
 3. Pemantapan peran Bapedalitbang sebagai motivator, koordinator, komunikator serta administrator suatu perencanaan
 4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
 5. Penyusunan SOP dan SPM
 6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK
 7. Peningkatan kematangan organisasi
 8. Peningkatan Digitalisasi dalam akuntabilitas kinerja

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2026 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.3. (T-C.31) Review RKPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2026

RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Output)	Target Capaian		Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Output)	Target Capaian		Pagu Indikatif
BAPPERIDA					7.634.019.252	BAPPERIDA					7.634.019.252
PERENCANAAN					7.444.019.252	PERENCANAAN					7.444.019.252
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.659.119.252	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.659.119.252
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	40.000.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	40.000.000
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	laporan	35.000.000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	laporan	35.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan				5.614.103.127	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan				5.614.103.127
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	504	orang/bulan	5.499.103.127	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	504	orang/bulan	5.499.103.127
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	115.000.000	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	115.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesisir Selatan				256.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesisir Selatan				256.600.000
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	33.000.000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	33.000.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket	30.000.000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket	30.000.000
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	15.000.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	15.000.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	28	dokumen	8.600.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	28	dokumen	8.600.000
- Fasilitas Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	laporan	25.000.000	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	laporan	25.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	130.000.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	130.000.000
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	dokumen	15.000.000	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	dokumen	15.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan				57.416.125	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan				57.416.125
- Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	unit	25.000.000	- Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	unit	25.000.000
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	unit	32.416.125	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	unit	32.416.125

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pesisir Selatan				440.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pesisir Selatan				440.000.000
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	100.000.000			-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	100.000.000
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	340.000.000			-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	340.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pesisir Selatan				216.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pesisir Selatan				216.000.000
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	62.000.000			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	62.000.000
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	92.000.000			-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	92.000.000
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	unit	22.000.000			-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	unit	22.000.000
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	40.000.000			-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	40.000.000
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Pesisir Selatan				510.000.000		Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Pesisir Selatan				510.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Pesisir Selatan				420.000.000		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Pesisir Selatan				420.000.000
	-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	dokumen	420.000.000			-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	dokumen	420.000.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Pesisir Selatan				40.000.000		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Pesisir Selatan				40.000.000
	-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	dokumen	20.000.000			-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	dokumen	20.000.000
	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	40	orang	20.000.000			-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	40	orang	20.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Pesisir Selatan				50.000.000		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Pesisir Selatan				50.000.000
	-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2	laporan	10.000.000			-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2	laporan	10.000.000
	-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	laporan	40.000.000			-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	laporan	40.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						274.900.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						274.900.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						112.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						112.000.000
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	dokumen	18.000.000	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	dokumen	18.000.000
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	laporan	6.000.000	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	laporan	6.000.000
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	laporan	7.000.000	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	laporan	7.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	2	laporan	10.000.000	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	2	laporan	10.000.000
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	dokumen	15.000.000	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	dokumen	15.000.000
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	laporan	4.000.000	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	laporan	4.000.000
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	laporan	12.000.000	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	dokumen	12.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	2	laporan	40.000.000	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	2	laporan	40.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						58.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						58.500.000
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	9.000.000	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	9.000.000

RENJA Tahun 2026 , Hal II- 19

	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	5.000.000		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	5.000.000
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	laporan	3.000.000		- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	laporan	3.000.000
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	laporan	4.000.000		- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	laporan	4.000.000
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	2	laporan	4.000.000		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	2	laporan	4.000.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						190.000.000		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					190.000.000
Penelitian dan Pengembangan Daerah						190.000.000		Penelitian dan Pengembangan Daerah					190.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pesisir Selatan				130.000.000		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pesisir Selatan				130.000.000
	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pesisir Selatan	Jumlah data Kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik	2	laporan	130.000.000		- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pesisir Selatan	Jumlah data Kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik	2	laporan	130.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Pesisir Selatan				60.000.000		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pesisir Selatan				60.000.000
	- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	dokumen	40.000.000		- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	dokumen	40.000.000
	- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan	1	laporan	20.000.000		- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan	1	laporan	20.000.000
BAPPERIDA						7.634.019.252		BAPPERIDA					7.634.019.252

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat nagari sampai ke tingkat kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut dapat diketahui berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Walaupun demikian Bapperida juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengakomodir usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah.

Dalam forum Musrenbang tersebut, tidak ada program ataupun kegiatan yang langsung ditujukan kepada Bapperida. Pada tabel berikut dapat kita lihat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 di Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan:

Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
	NIHIL				
Total					

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam arahan kebijakan pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Dalam rancangan awal RKPD tersebut arah kebijakan pembangunan difokuskan pada (1) pencapaian RPJMD tahun 2025-2029, (2) pencapaian sasaran pokok pembangunan berdasarkan RPJPD tahun 2025-2045 pada tahapan ke-4 dan (3) mendukung cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan, maka Bapperida menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Berkualitas Yang Berbasis Riset dan Inovasi “

Tujuan ini memiliki indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 75 pada tahun 2026.

B. Sasaran

Sasaran atau objektivitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah.

Indikator untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, **Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja**, dan **Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja**. Pada tahun 2026 target kinerja indikator Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja adalah **24,60** dan Komponen Pengukuran Kinerja dengan target **18,53**.

2. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Riset dan Inovasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah, sehingga berperan penting dalam pembangunan daerah. Melalui riset dan inovasi, diperoleh hal-hal baru yang akan diterapkan untuk kemajuan pembangunan daerah. Riset berupa kajian ilmiah digunakan untuk menganalisa tingkat kemajuan dan keberhasilan suatu program yang mendukung pembangunan daerah. Inovasi berupa penemuan hal-hal baru sangat berperan penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan daerah sehingga berkontribusi dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang digunakan adalah **Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah** dengan target tahun 2026 adalah **100%**, **Jumlah karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi dan terakreditasi nasional** dengan target masing-masing 1 karya tulis ilmiah dan indikator **Skor Kematangan Inovasi Daerah** dengan target **91** serta indikator **Nilai Kematangan Inovasi Bapperida** dengan target **100**.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menjadi salah satu instrument untuk mengukur tingkat integritas dan profesionalisme Perangkat Daerah. Indikator yang digunakan adalah **Nilai AKIP Perangkat Daerah** dengan target tahun 2026 adalah **90,47**.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida berpedoman pada Renstra Bapperida 2025-2029, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan tahun yang sudah berlalu dan sasaran RPJPD tahapan ke-1. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida tahun 2026 serta Prakiraan Maju Rencana program dan kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida tahun 2027, dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

Tahun 2025																					
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						7.634.019.252,00				7.937.703.127,00						
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.434.019.252,00				7.937.703.127,00						
	5	01			PERENCANAAN						7.244.019.252,00				7.707.703.127,00						
1	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.659.119.252,00					-	6.824.703.127,00				
	5	01	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	95.000.000,00			
	5	01	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														00	01	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														00	07	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.614.103.127,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	5.719.103.127,00			
	5	01	01	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														00	01	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan Orang/bulan	5.499.103.127,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.599.103.127,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		

5	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	256.600.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	268.600.000,00	
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				28 Dokumen	8.600.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		8.600.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			6	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			6	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	57.416.125,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	70.000.000,00	
5	01	01	2.0	00	Pengadaan Mebel															
			7	05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			7	06		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	32.416.125,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	440.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	440.000.000,00	
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			8	02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			8	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	340.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		340.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	216.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	232.000.000,00	
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			9	01		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	62.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			9	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit	92.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		94.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			9	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					24 Unit	22.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			9	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-				-	510.000.000,00			-		-	-	380.000.000,00	

5	01	02	2.0	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	420.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	250.000.000,00	
5	01	02	2.0	00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	420.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.0	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	60.000.000,00	
5	01	02	2.0	00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.0	00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				40 Orang	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.0	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	70.000.000,00	
5	01	02	2.0	00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.0	00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-		-	274.900.000,00					-		503.000.000,00	
	5	01	03	2.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-		-	112.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	180.000.000,00	
5	01	03	2.0	00	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				18 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			1	06		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			1	07		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			1	08		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	58.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	143.000.000,00	
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			2	01		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			2	02		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	104.400.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	180.000.000,00	

5	01	03	2.0	00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	7.400.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur															
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	17.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	7.400.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	17.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.0	00	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					190.000.000,00												230.000.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-				-	190.000.000,00							-	-		230.000.000,00	
	5	05	02	2.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-				-	130.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-			150.000.000,00		
	5	05	02	2.0	00	112Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik					2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-				150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	05	02	2.0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-				-	60.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-			80.000.000,00		
	5	05	02	2.0	00	401Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-				50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	05	02	2.0	00	404Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-				30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	J U M L A H												7.634.019.252,00								7.937.703.127,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 2 urusan yakni 1.) Urusan Penelitian dan Pengembangan dan 2.) Urusan Perencanaan. Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Indikatornya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventerisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 terdapat 4 Program, 14 kegiatan dan 51 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja Satuan Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan			
No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		BAPEDALITBANG	7.634.019.252
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.634.019.252
	5. 01.	Urusan : PERENCANAAN	7.444.019.252
	5. 01. 01.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.659.119.252
	5. 01. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000
	5. 01. 01. 2.01. 01.	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
	5. 01. 01. 2.01. 07.	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000
	5. 01. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.614.103.127
	5. 01. 01. 2.02. 01.	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.499.103.127
	5. 01. 01. 2.02. 02.	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.000.000
	5. 01. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.600.000
	5. 01. 01. 2.06. 01.	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000
	5. 01. 01. 2.06. 04.	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
	5. 01. 01. 2.06. 05.	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
	5. 01. 01. 2.06. 06.	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000
	5. 01. 01. 2.06. 08.	- Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000
	5. 01. 01. 2.06. 09.	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000
	5. 01. 01. 2.06. 10.	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000
	5. 01. 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.416.125
	5. 01. 01. 2.07. 05.	- Pengadaan Mebel	25.000.000
	5. 01. 01. 2.07. 06.	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.416.125
	5. 01. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.000.000
	5. 01. 01. 2.08. 02.	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000
	5. 01. 01. 2.08. 04.	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.000.000
	5. 01. 01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.000.000
	5. 01. 01. 2.09. 01.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	62.000.000
	5. 01. 01. 2.09. 02.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.000.000
	5. 01. 01. 2.09. 06.	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000
	5. 01. 01. 2.09. 09.	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
	5. 01. 02.	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	510.000.000
	5. 01. 02. 2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	420.000.000
	5. 01. 02. 2.01. 07.	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000

5. 01. 02. 2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.000.000
5. 01. 02. 2.02. 01.	-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000
5. 01. 02. 2.02. 02.	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	20.000.000
5. 01. 02. 2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000
5. 01. 02. 2.03. 01.	-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	10.000.000
5. 01. 02. 2.03. 03.	-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40.000.000
5. 01. 03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	274.900.000
5. 01. 03. 2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	112.000.000
5. 01. 03. 2.01. 01.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.000.000
5. 01. 03. 2.01. 02.	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.000.000
5. 01. 03. 2.01. 03.	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.000.000
5. 01. 03. 2.01. 04.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.000.000
5. 01. 03. 2.01. 05.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000
5. 01. 03. 2.01. 06.	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.000.000
5. 01. 03. 2.01. 07.	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.000.000
5. 01. 03. 2.01. 08.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.000.000
5. 01. 03. 2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	58.500.000
5. 01. 03. 2.02. 01.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.000.000
5. 01. 03. 2.02. 02.	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.000.000
5. 01. 03. 2.02. 03.	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.000.000
5. 01. 03. 2.02. 04.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	8.000.000
5. 01. 03. 2.02. 05.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.000.000
5. 01. 03. 2.02. 06.	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.000.000
5. 01. 03. 2.02. 07.	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.500.000
5. 01. 03. 2.02. 08.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	8.000.000

5. 01. 03. 2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	104.400.000
5. 01. 03. 2.03. 01.	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.000.000
5. 01. 03. 2.03. 02.	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.000.000
5. 01. 03. 2.03. 03.	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.400.000
5. 01. 03. 2.03. 04.	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	17.000.000
5. 01. 03. 2.03. 05.	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.000.000
5. 01. 03. 2.03. 06.	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.000.000
5. 01. 03. 2.03. 07.	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.000.000
5. 01. 03. 2.03. 08.	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4.000.000
5. 05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	190.000.000
5. 05. 02.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	190.000.000
5. 05. 02. 2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	130.000.000
5. 05. 02. 2.01. 12.	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	130.000.000
5. 05. 02. 2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	60.000.000
5. 05. 02. 2.04. 01.	- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	40.000.000
5. 05. 02. 2.04. 04.	- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	20.000.000
	BAPEDALITBANG	7.634.019.252

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah. Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2026, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun— hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan adanya penyempurnaan.

Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI